



Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Silvina^{1*}, Erni Achmad², Yuliusman³

¹⁻³Prodi Keuangan Daerah, Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondasi: silvinaaaa9@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the contribution of Regional Original Revenue (PAD) sources, the growth of PAD, and the level of regional fiscal independence in Tanjung Jabung Barat Regency during the 2017–2024 period. The PAD sources examined include local taxes, regional retributions, returns from separated regional assets, and other legitimate PAD. The data used in this study are secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA) of Tanjung Jabung Barat Regency for the period 2017–2024, obtained from the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Tanjung Jabung Barat and the Directorate General of Fiscal Balance. This research employs a quantitative descriptive approach. The analytical techniques used include contribution analysis of PAD sources (local taxes, regional retributions, returns from separated regional assets, and other legitimate PAD), PAD growth analysis, and fiscal independence ratio analysis. The results indicate that PAD is predominantly contributed by other legitimate PAD, accounting for 62.54% of total PAD, followed by local taxes contributing 26.06%, while regional retributions and returns from separated regional assets contribute relatively low proportions. The growth of PAD during the study period shows fluctuations influenced by economic conditions, including the impact of the COVID-19 pandemic. Furthermore, the level of fiscal independence in Tanjung Jabung Barat Regency is categorized as very low, as reflected in the high dependence on transfer funds from the central government and other governmental assistance.*

Keyword: *Fiscal Independence; PAD Contribution; PAD Growth; Regional Financial Performance; Regional Original Revenue (PAD) Sources.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perkembangan penerimaan PAD, serta Tingkat kemandirian fiskal daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2017–2024. Sumber-sumber PAD yang dianalisis meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa realisasi anggaran (LRA) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2017–2024 yang diperoleh dari Bapenda Tanjung Jabung Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan teknik analisis yang digunakan meliputi analisis kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, analisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan analisis rasio kemandirian fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sumber-sumber PAD masih didominasi oleh lain-lain PAD yang sah yang menyumbang 62.54% dan pajak daerah yang menyumbang 26,06% dari total PAD, sementara kontribusi retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah relatif rendah. Perkembangan PAD selama periode penelitian mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19. Tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tergolong sangat rendah, yang ditunjukkan oleh tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan bantuan pemerintah.

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal; Kontribusi PAD; Pertumbuhan PAD; Kinerja Keuangan Regional; Sumber Pendapatan Asli Regional (PAD).

1.PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Penerapan desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah mencerminkan keseluruhan sistem, kelembagaan, serta kebijakan pengelolaan anggaran yang mencakup aspek pendapatan dan belanja daerah. Sumber penerimaan daerah meliputi sisa

lebih anggaran tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman, serta sumber pendapatan sah lainnya (Wibowo & Oktivalerina, 2022).

Salah satu aspek penting dalam desentralisasi fiskal adalah kemampuan daerah dalam mencapai kemandirian fiskal, yang tercermin dari sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik melalui sumber pendapatannya sendiri, khususnya Pendapatan Asli Daerah (Pabayo, 2025). PAD memiliki peran strategis karena menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin rendah ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam struktur penerimaan daerah yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di tingkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PAD bersumber dari beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis terhadap kontribusi masing-masing sumber PAD menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana peran masing-masing komponen dalam membentuk struktur pendapatan daerah serta dalam mendukung kemandirian fiskal. Selain itu, pengamatan terhadap perkembangan PAD dalam periode 2017–2024 memberikan gambaran yang lebih komprehensif, terutama dalam melihat dinamika pasca pandemi dan perubahan kebijakan fiskal daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah di berbagai wilayah. Penelitian (Saputra dan Fernando, 2017) menemukan bahwa meskipun pertumbuhan PAD menunjukkan tren positif, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih di bawah 50%, sehingga tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah. Penelitian lain oleh (Setiawan & Surtini, 2017) juga menunjukkan bahwa meskipun efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah cukup tinggi, kontribusinya terhadap PAD masih belum optimal. Selain itu, penelitian (Nasir, 2019) mengungkapkan bahwa PAD cenderung didominasi oleh sumber tertentu, seperti pajak daerah, sementara kontribusi sumber lain relatif kecil, sehingga menimbulkan ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta hubungannya dengan tingkat kemandirian fiskal daerah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pertumbuhan PAD secara umum, tanpa menguraikan secara rinci kontribusi masing-masing sumber PAD dalam membentuk struktur pendapatan

daerah. Selain itu, kajian yang menganalisis perkembangan PAD dalam jangka waktu yang lebih panjang serta keterkaitannya dengan tingkat kemandirian fiskal daerah, khususnya pada tingkat kabupaten, masih relatif terbatas. Penelitian dengan menggunakan data terbaru untuk menggambarkan kondisi kemandirian fiskal daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2017–2024.

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sumber-sumber PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, sekaligus mengkaji perkembangan penerimaan PAD dan tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2017–2024.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan menggambarkan secara sistematis mengenai kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan penerimaan PAD, serta tingkat kemandirian fiskal daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2017–2024. Penelitian deskriptif kuantitatif digunakan karena mampu memberikan gambaran empiris berdasarkan data numerik yang dianalisis secara objektif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017–2024. Data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen resmi lainnya yang relevan. Data yang digunakan meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, serta total pendapatan daerah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kontribusi sumber-sumber PAD, Perkembangan PAD, dan Analisis Kemandirian Fiskal.

Kontribusi Sumber-sumber PAD

Analisis komponen PAD yang melibatkan pemecahan PAD menjadi komponen-komponen utamanya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Proporsi Komponen PAD digunakan untuk melihat kontribusi sumber-sumber PD terhadap total PAD. Menghitung Persentase setiap komponen PAD menggunakan rumus sebagai berikut (Nasir, 2019):

$$\text{Sumber – Sumber PAD} = \frac{\text{Jenis PAD}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Kontribusi Sumber-sumber PAD daerah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Kriteria Kontribusi Sumber-sumber PAD.

Persentase Kontribusi	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Halim & Kusufi (2007).

Perkembangan PAD

Menurut Mahmudi (2019), analisis pertumbuhan digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan perubahan kinerja dalam suatu periode tertentu, baik mengalami peningkatan maupun penurunan. Dengan demikian, rasio pertumbuhan mencerminkan perkembangan pendapatan dari satu periode ke periode berikutnya, yang dapat menunjukkan apakah terjadi pertumbuhan positif atau justru penurunan (negatif). Untuk menghitung perkembangan PAD dari tahun ke tahun, maka digunakan rumus sebagai berikut (Syahda & Setya, 2023).

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Kemandirian Fiskal

Analisis data kemandirian ini melibatkan pengukuran rasio PAD terhadap total pendapatan, yang memberikan gambaran tentang seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber eksternal dengan rumus berikut.

$$\text{Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Kriteria Rasio Kemandirian Fiskal.

Kemandirian (%)	Kategori	Pola Hubungan
0% - 25%	Sangat Rendah	Instruktif
>25% – 50%	Rendah	Konsultatif
>50% – 75%	Sedang	Partisipatif

>75% – 100%

Tinggi

Delegatif

Sumber: Halim & Kusufi (2007).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Sumber-sumber PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi ekonomi yang berasal dari wilayahnya sendiri dan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. PAD mencerminkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan serta pembangunan secara mandiri sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah (Putri et al., 2023). Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Menurut Halim & Kusufi (2007), analisis kontribusi digunakan untuk melihat struktur pendapatan daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber-sumber penerimaan tertentu. Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2017-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Hasil Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2017–2024.

Komponen PAD (2017–2024)	Nilai (miliar rupiah)	Persentase (%)
Pajak Daerah	258.58	26,06
Retribusi Daerah	23.04	2,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	89.47	9,02
Lain-lain PAD yang Sah	624,72	62,54
Jumlah	995,81	100,00

Sumber: Data diolah, 2026.

Tabel di atas menunjukkan kontribusi berbagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2017–2024. Total Pad yang terkumpul mencapai 995,81 miliar rupiah, dengan kontribusi terbesar berasal dari kategori Lain-lain PAD yang Sah, yaitu sebesar 624,72 miliar rupiah atau 62,54% dari total PAD. Komponen kedua terbesar

adalah Pajak Daerah sebesar 258,58 miliar rupiah atau sekitar 26,06% dari total pendapatan.

Berikut ini rincian dari Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah di Indonesia yang bersifat wajib bagi individu maupun badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung (Anggraeni et al., 2020). Pajak daerah memiliki potensi yang signifikan untuk terus dioptimalkan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, penerimaan dari pajak daerah memegang peranan penting dalam menunjang keuangan pemerintah daerah (Suwarno & Suhartiningsih, 2008).

Sumber pajak daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan (karaoke) pajak salon kecantikan, pajak reklame/billboard/videofrom/megatron, pajak penerangan jalan PLN, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Berikut adalah Penerimaan PAD (pajak daerah) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 4. Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017–2024.

Tahun	Pajak Daerah (miliar rupiah)	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	27,27	25,92	Sedang
2018	31,36	22,56	Sedang
2019	35,43	29,47	Sedang
2020	30,83	26,68	Sedang
2021	31,64	26,69	Sedang
2022	33,01	25,30	Sedang
2023	35,48	27,54	Sedang
2024	33,57	24,32	Sedang
Rata-Rata	32,32	26,06	Sedang

Sumber : BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2026.

Berdasarkan data pada tabel 5, dapat dilihat bahwa perkembangan pajak daerah selama periode 2017–2024 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Nilai pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 35,43 miliar rupiah, sedangkan nilai terendah tercatat pada tahun 2017 sebesar 27,27 miliar rupiah. Secara umum, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada kisaran 22,56% hingga 29,47%, yang menunjukkan bahwa peran pajak daerah berada dalam kategori sedang. Dilihat dari rata-ratanya, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 26,06%

terhadap total PAD dengan nilai rata-rata penerimaan sebesar 32,32 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber penting dalam struktur PAD, meskipun belum menjadi sumber dominan. Kategori sedang tersebut mencerminkan bahwa potensi pajak daerah masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah jenis penerimaan yang diambil sebagai bayaran atau imbalan langsung kepada pembayar, seperti parkir, kebersihan, pasar, atau perizinan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Berikut adalah Penerimaan PAD (retribusi daerah) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 5. Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2017–2024.

Tahun	Retribusi Daerah (miliar rupiah)	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	5,73	5,45	Sangat Kurang
2018	2,48	1,79	Sangat Kurang
2019	2,41	2,00	Sangat Kurang
2020	1,90	1,64	Sangat Kurang
2021	2,57	2,16	Sangat Kurang
2022	2,42	1,86	Sangat Kurang
2023	2,57	2,00	Sangat Kurang
2024	2,96	2,14	Sangat Kurang
Rata-rata	2,88	2,38	Sangat Kurang

Sumber : BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2026.

Berdasarkan data pada tabel 6, dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah selama periode 2017–2024 menunjukkan fluktuasi yang cenderung rendah dan belum stabil. Nilai retribusi daerah tertinggi tercatat pada tahun 2017 sebesar 5,73 miliar rupiah, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,90 miliar rupiah. Setelah mengalami penurunan pada beberapa tahun awal, penerimaan retribusi daerah terlihat relatif stagnan dengan kenaikan yang tidak signifikan hingga tahun 2024. Dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah berada pada kisaran 1,64% hingga 5,45%, dengan rata-rata sebesar 2,38%. Persentase ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah termasuk dalam kategori sangat kurang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peran retribusi daerah dalam mendukung PAD masih sangat terbatas dan belum mampu menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Secara keseluruhan, rendahnya kontribusi retribusi daerah mencerminkan belum

optimalnya pengelolaan retribusi, baik dari sisi pemungutan, pengawasan, maupun pengembangan jenis layanan publik yang dapat dikenakan retribusi.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Salah satu sumber penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak dan retribusi daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dibentuk tidak hanya sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan dari komponen ini umumnya berupa dividen atau bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (3), sumber pendapatan tersebut mencakup laba dari perusahaan daerah, lembaga keuangan bank dan non-bank, serta hasil dari kegiatan investasi atau penyertaan modal daerah.

Tabel 6. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2017–2024.

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (miliar rupiah)	Kontibusi (%)	Kriteria
2017	10,10	9,61	Sangat Kurang
2018	10,43	7,50	Sangat Kurang
2019	10,95	9,11	Sangat Kurang
2020	10,66	9,23	Sangat Kurang
2021	10,72	9,04	Sangat Kurang
2022	11,70	8,97	Sangat Kurang
2023	12,44	9,66	Sangat Kurang
2024	12,46	9,02	Sangat Kurang

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (miliar rupiah)	Kontibusi (%)	Kriteria
Rata-rata	11,18	9,02	Sangat Kurang

Sumber : BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2026.

Berdasarkan data pada tabel, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama periode 2017–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat secara bertahap. Nilai penerimaan terendah tercatat pada tahun 2017 sebesar 10,10 miliar rupiah, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 12,46 miliar rupiah. Meskipun mengalami peningkatan, pertumbuhan yang terjadi cenderung tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), komponen ini berada pada kisaran 7,50% hingga 9,66%, dengan rata-rata sebesar 9,02%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih tergolong dalam kategori sangat kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau penyertaan modal pemerintah daerah belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan PAD

Lain-lain PAD yang Sah

Sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Tanjung Jabung Barat, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan denda pajak daerah, Pendapatan dari pengembalian. Lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2017–2024.

Tahun	Lain-lain PAD yang Sah (miliar rupiah)	Kontibusi (%)	Kriteria
2017	62,08	59,02	Sangat Baik
2018	94,71	68,15	Sangat Baik
2019	71,44	59,42	Sangat Baik
2020	72,12	62,45	Sangat Baik
2021	73,61	62,10	Sangat Baik
2022	83,34	63,87	Sangat Baik
2023	78,32	60,80	Sangat Baik
2024	89,06	64,52	Sangat Baik
Rata-rata	78,09	62,54	Sangat Baik

Sumber : BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2026.

Berdasarkan data pada tabel, penerimaan dari lain-lain PAD yang sah selama periode 2017–2024 menunjukkan nilai yang relatif tinggi dibandingkan dengan sumber PAD lainnya, meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2018 sebesar 94,71 miliar rupiah, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 62,08 miliar rupiah. Secara umum, komponen ini cenderung menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PAD. Dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), lain-lain PAD yang sah berada pada kisaran 59,02% hingga 68,15%, dengan rata-rata sebesar 62,54%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kontribusinya termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar PAD masih didominasi oleh komponen lain-lain PAD yang sah.

Perkembangan PAD

Perkembangan PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerahnya sendiri. Perkembangan ini biasanya dianalisis secara tahunan untuk melihat tren kinerja keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dalam analisis keuangan daerah, perkembangan PAD dapat diukur menggunakan tingkat pertumbuhan, yaitu dengan membandingkan nilai PAD tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi pertumbuhan PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber lokal. Perkembangan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017–2024.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (miliar rupiah)	Perkembangan (%)
2017	105,18	-
2018	138,98	32,13
2019	120,22	-13,50
2020	115,56	-3,88
2021	118,53	2,57
2022	130,48	10,09
2023	128,82	-1,27
2024	138,04	7,16

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (miliar rupiah)	Perkembangan (%)
Rata-rata		4,16

Sumber : BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2026.

Berdasarkan Tabel 9, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,16%. Pada awal periode, PAD mengalami peningkatan signifikan, terutama pada tahun 2018 yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 32,13%. Namun, pada tahun 2019–2020 terjadi kontraksi dengan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar –13,50% dan –3,88%. PAD mulai mengalami pemulihan pada tahun 2021–2022 dengan pertumbuhan positif, sebelum kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, PAD kembali meningkat sebesar 7,16%, menunjukkan perbaikan kinerja penerimaan daerah. Secara keseluruhan, perkembangan PAD dapat dibagi ke dalam beberapa fase, yaitu ekspansi (2017–2018), kontraksi (2019–2020), pemulihan (2021–2022), dan fluktuatif cenderung meningkat (2023–2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren peningkatan, stabilitas PAD masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal adalah konsep yang merujuk pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Konsep ini menekankan sejauh mana daerah mampu mengelola sumber-sumber keuangannya secara mandiri dan berkesinambungan.

Kemandirian fiskal mencerminkan tingkat kemampuan dan otonomi keuangan yang dimiliki oleh entitas subnasional, seperti pemerintah daerah, dalam mengelola sumber daya keuangannya tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dukungan maupun intervensi dari pemerintah pusat (Eroğlu & Serbes, 2018). Tingkat kemandirian fiskal daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan serta melaksanakan fungsi pemerintahan secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Zakiah, 2022). Rinciain Kemandirian Fiskal Daerah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 9. Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017–2024.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Dana Transfer dari Pusat/Provinsi dan Pinjaman Daerah	Kemandirian Fiskal (%)	Kriteria	Pola Hubungan
2017	105.183.811.202.39	1.188.270.306.626.34	8.85	Sangat Rendah	Instruktif
2018	138.983.928.372.52	1.244.126.285.696.53	11.17	Sangat Rendah	Instruktif
2019	120.220.481.667.74	1.522.117.761.615.97	7.90	Sangat Rendah	Instruktif
2020	115.556.810.302.20	1.305.858.372.778.11	8.85	Sangat Rendah	Instruktif
2021	118.526.444.007.64	1.421.872.686.685.00	8.34	Sangat Rendah	Instruktif
2022	130.480.014.294.38	1.534.536.488.046.69	8.50	Sangat Rendah	Instruktif
2023	128.818.246.430.46	1.364.638.482.085.00	9.44	Sangat Rendah	Instruktif
2024	138.039.895.430.37	1.871.370.786.390.00	7.38	Sangat Rendah	Instruktif
Rata-rata	138.039.895.430.37	1.431.777.072.990.46	8.8	Sangat Rendah	Instruktif

Sumber : BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2026.

Berdasarkan Tabel 10, Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2017–2024 menunjukkan nilai yang sangat rendah dengan rata-rata sebesar 8,8%. Seluruh periode penelitian berada dalam kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, yang berarti ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Nilai kemandirian fiskal tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 11,17%, sedangkan terendah pada tahun 2024 sebesar 7,38%. Meskipun terdapat fluktuasi setiap tahunnya, tingkat kemandirian fiskal secara umum tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan besarnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi sumber-sumber

pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi dan kemandirian fiskal daerah dapat meningkat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2017–2024 menunjukkan ketidakseimbangan antar sumber penerimaan. Pajak daerah memberikan kontribusi dalam kategori sedang dengan peran yang cukup stabil, sementara retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih tergolong sangat rendah dan belum optimal dalam mendukung PAD. Di sisi lain, lain-lain PAD yang sah menjadi komponen paling dominan dengan kontribusi sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD lebih banyak ditopang oleh sumber ini dibandingkan sumber utama lainnya. Dari aspek perkembangan, PAD menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam jangka menengah. Meskipun demikian, pertumbuhan yang terjadi masih tergolong moderat dan belum stabil, yang terlihat dari adanya kontraksi pada beberapa tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD masih dipengaruhi oleh dinamika ekonomi serta efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu, tingkat kemandirian fiskal daerah berada pada kategori sangat rendah, yang mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri masih terbatas, sehingga diperlukan upaya optimalisasi dan diversifikasi sumber PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Saran

Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber PAD, terutama pajak dan retribusi daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan sistem digital agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, kontribusi retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah perlu ditingkatkan melalui perbaikan kualitas layanan publik dan pengelolaan BUMD yang lebih profesional. Di sisi lain, ketergantungan pada lain-lain PAD yang sah perlu dikurangi dengan memperkuat sumber PAD yang lebih berkelanjutan. Untuk meningkatkan stabilitas pertumbuhan PAD, pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal, pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap dana

transfer dengan cara mengoptimalkan potensi ekonomi daerah secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustine, A., & Rahmi, D. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, investasi swasta, jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung periode 2008–2022. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 4(1), 41–48. <https://doi.org/10.29313/bcses.v4i1.9969>
- Barat, B. P. D. K. T. J. (n.d.). Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Retrieved from <https://bapenda.tanjabbarkab.go.id/>
- Eroğlu, E., & Serbes, H. (2018). Fiscal autonomy of sub-central governments in Turkey. In *Comparative studies and regionally-focused cases examining local governments* (pp. 83–100). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3713-7.ch004>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Selemba Empat.
- Indonesia, K. K. R. (2022). Kajian Fiskal Regional. Retrieved from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>
- Indonesia, P. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*, 104172, 1–143. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Putri, A. A., Siboro, S. F., & Safitri, E. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jombang. 2(3), 64–74.
- Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi sumber-sumber PAD dalam mendukung kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1515–1534. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9215>
- Sasana, A., & Pabayo, T. (2025). The impact of fiscal decentralization policy on regional fiscal independence in Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 8(22), 142–160.
- Setiawan, A. B., & Surtini, E. (2017). Analisis kontribusi dan efektivitas sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Akunida*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.30997/jakd.v3i1.984>

- Suhartiningsih, S., & (2008). Efektivitas evaluasi potensi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 162–173.
- Syahda, N., & Setya, Y. F. P. (2023). Pengaruh laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak reklame, BPHTB, pajak air tanah terhadap penerimaan PAD. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ*, 4(1).
- Wibowo, E. A., Pertama, P., Alokasi, D., Pembangunan, P., Perencana, F., Direktorat, M., Daerah, P., & Barat, K. (2022). Analisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi kasus Indonesia. *V*(1), 97–119.
- Zakiah, K. (2020). Pendapatan asli daerah terhadap indeks kemandirian fiskal daerah tahun 2016–2020. *7*, 364–378.